



## **Pendampingan Pemerintah Provinsi Papua Dalam Penetapan Lokasi Pembangunan Pos Lintas Batas Laut (PLBL) Kota Jayapura**

**Arkam<sup>1\*</sup>, Dwi Fitrianiingsih<sup>2</sup>, Wahyu Atiq Widianoro<sup>3</sup>, Djufri<sup>4</sup>, Agista Aristia Arini<sup>5</sup>, Rizky Ramadhan Hardianto<sup>6</sup>**

<sup>1-4</sup>Universitas Muhammadiyah Berau, Indonesia

<sup>1</sup>[arkam@umberau.ac.id](mailto:arkam@umberau.ac.id), <sup>2</sup>[dwi@umberau.ac.id](mailto:dwi@umberau.ac.id), <sup>3</sup>[wahyuatq@umberau.ac.id](mailto:wahyuatq@umberau.ac.id), <sup>4</sup>[djuf\\_rie@yahoo.com](mailto:djuf_rie@yahoo.com),  
<sup>5</sup>[agista@umberau.ac.id](mailto:agista@umberau.ac.id), <sup>6</sup>[rizkyyy292@gmail.com](mailto:rizkyyy292@gmail.com)

### **Article Info**

#### ***Article history:***

Received 04/07/2026

Revised 12/07/2026

Accepted 17/07/2026

#### ***Keyword:***

PLBL, site selection,  
feasibility, border,  
Jayapura City.

### **ABSTRACT**

The assistance provided to the Papua Provincial Government regarding site selection for the Jayapura City Maritime Border Crossing Pos (PLBL) was conducted to support a comprehensive process of identifying and assessing the feasibility of the site. The analysis covered spatial planning aspects, physical and environmental conditions, accessibility, socio-economic factors, service requirements, supporting infrastructure, security, and institutional arrangements. Three alternative sites were evaluated based on land suitability, geographical conditions, accessibility, infrastructure support, cross-border service potential, environmental risks, and community acceptance. The assessment process involved discussions and Focus Group Discussions (FGDs) with the Border Management Agency, the Regional Development Planning Agency (Bappeda), the Public Works Agency, the Naval Post, district and village governments, and relevant technical agencies. The evaluation and cross-sectoral discussions resulted in a consensus that Alternative Site I was the most suitable location for the PLBL. This site was deemed to possess relatively stable physical conditions, favorable topography, superior accessibility, spatial planning compatibility, and opportunities for integration with existing infrastructure and service networks. The selection of this site is expected to support improved connectivity, cross-border services, and security, as well as the sustainable development of the border area.



©2024 Authors. Published by Universitas Muhammadiyah Berau.. This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License. (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>)

## **PENDAHULUAN**

### **Latar Belakang**

Rencana pembangunan Pos Lintas Batas Laut (PLBL) Kota Jayapura merupakan bagian penting dalam mendukung penguatan fungsi kawasan perbatasan, peningkatan konektivitas, serta pelayanan lintas batas melalui jalur laut. Namun, pelaksanaan pembangunan PLBL perlu mempertimbangkan berbagai aspek kelayakan, baik dari sisi tata ruang, kondisi fisik dan lingkungan, aksesibilitas, sosial ekonomi, kelembagaan, maupun kebutuhan infrastruktur

pendukung. Perencanaan pembangunan infrastruktur pada kawasan perbatasan yang tidak didasarkan pada kajian kelayakan yang komprehensif berpotensi menimbulkan permasalahan dalam pemanfaatan ruang, efektivitas pelayanan, serta keberlanjutan pengelolaan kawasan.

Dinamika perkembangan aktivitas dan mobilitas masyarakat di kawasan pesisir Kota Jayapura, khususnya yang berkaitan dengan pergerakan lintas batas melalui jalur laut, memerlukan dukungan infrastruktur yang memadai dan sesuai dengan karakteristik wilayah. Oleh karena itu, diperlukan kajian kelayakan yang sistematis untuk mengidentifikasi potensi, kebutuhan, kendala, dan kesiapan wilayah dalam mendukung pembangunan PLBL. Hasil kajian diharapkan dapat menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam menentukan kelayakan pembangunan, lokasi, kebutuhan fasilitas dan infrastruktur pendukung, serta arahan pengembangan PLBL Kota Jayapura yang efektif, aman, fungsional, dan berkelanjutan.

Dalam konteks tersebut, perguruan tinggi memiliki peran strategis sebagai agen perubahan melalui pelaksanaan tridarma perguruan tinggi, khususnya dalam mendukung peningkatan kapasitas pemerintah daerah melalui kegiatan kajian dan pendampingan. Perguruan Tinggi Muhammadiyah, dengan komitmen terhadap pemberdayaan masyarakat dan pembangunan wilayah, menempatkan pendekatan edukatif, kolaboratif, dan aplikatif sebagai landasan dalam pelaksanaan kegiatan. Keterlibatan perguruan tinggi dalam Kajian Kelayakan Pembangunan Pos Lintas Batas Laut (PLBL) Kota Jayapura menjadi wujud nyata implementasi peran tersebut melalui penguatan pemahaman terhadap kebijakan dan regulasi terkait kawasan perbatasan, analisis kondisi dan potensi wilayah, kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, serta penyusunan rekomendasi kelayakan yang dapat menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam menentukan arah pembangunan PLBL secara tepat, efektif, dan berkelanjutan.

Sebagai bagian dari tim pendamping pemerintah daerah dalam pelaksanaan Kajian Kelayakan Pembangunan Pos Lintas Batas Laut (PLBL) Kota Jayapura, keterlibatan tenaga ahli dari kalangan akademisi menjadi elemen penting dalam menjamin kualitas substansi, metodologi, dan pendekatan teknis yang diterapkan. Tim pendamping merupakan dosen Universitas Muhammadiyah Berau yang memiliki kompetensi di bidang perencanaan wilayah dan kota, sehingga mampu menjembatani kerangka normatif perencanaan, pendekatan akademik, serta kebutuhan praktis pemerintah daerah dalam menilai kelayakan pembangunan PLBL. Keterlibatan tenaga ahli tersebut tidak hanya memperkuat aspek keilmuan dan profesionalitas kajian, tetapi juga menjadi bentuk kontribusi perguruan tinggi Muhammadiyah dalam mendukung pembangunan infrastruktur perbatasan yang terencana, fungsional, dan berkelanjutan. Melalui kajian ini, diharapkan terbangun sinergi antara perguruan tinggi dan

pemerintah daerah dalam menghasilkan rekomendasi kelayakan pembangunan PLBL Kota Jayapura yang komprehensif, berbasis kondisi dan potensi wilayah, serta mendukung peningkatan konektivitas, pelayanan lintas batas, dan pengembangan kawasan perbatasan.

### **Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang kajian kelayakan pembangunan Pos Lintas Batas Laut (PLBL) Kota Jayapura, rumusan masalah yang dikaji adalah:

1. Bagaimana gambaran lokasi pembangunan Pos Lintas Batas Laut (PLBL) di Kota Jayapura ditinjau dari aspek fisik lingkungan, spasial, aksesibilitas, sosial budaya, dan kebencanaan?
2. Alternati lokasi manakah yang terpilih sebagai lokasi pembangunan Pos Lintas Batas Laut (PLBL) yang sesuai dengan karakteristik kawasan serta mendukung fungsi pelayanan lintas batas di Kota Jayapura?

### **Tujuan Pengabdian**

Berdasarkan permasalahan yang telah diidentifikasi dalam rencana pembangunan Pos Lintas Batas Laut (PLBL) Kota Jayapura, kegiatan ini bertujuan untuk:

3. Mendampingi Pemerintah Daerah dalam mengidentifikasi dan menganalisis tingkat kelayakan pembangunan Pos Lintas Batas Laut (PLBL) Kota Jayapura berdasarkan aspek tata ruang, kondisi fisik dan lingkungan, aksesibilitas, sosial ekonomi, kebutuhan pelayanan, serta aspek kelembagaan.
4. Mendampingi Pemerintah Daerah dalam merumuskan rekomendasi kelayakan pembangunan PLBL Kota Jayapura, meliputi arahan lokasi, kebutuhan fasilitas dan infrastruktur pendukung, serta konsep pengembangan yang sesuai dengan karakteristik wilayah, kebutuhan pelayanan lintas batas, dan kebijakan serta regulasi yang berlaku.

## **METODE PELAKSANAAN PKM**

### **Lokasi dan Waktu**

Pengabdian dilaksanakan di Distrik Skouw Kota Jayapura Provinsi Papua, dengan fokus pada 3 (tiga) alternati lokasi. Pengabdian dilakukan selama 2 bulan (Maret-April 2026).

### **Tahapan Pelaksanaan**

Kegiatan ini menggunakan pendekatan partisipatif dan kolaboratif melalui skema pendampingan teknis kepada Pemerintah Daerah Kota Jayapura dalam pelaksanaan Kajian Kelayakan Pembangunan Pos Lintas Batas Laut (PLBL). Metode pelaksanaan dilakukan secara

bertahap untuk memastikan proses pengumpulan data, analisis, pembahasan, hingga perumusan rekomendasi kelayakan dapat dilaksanakan secara sistematis. Tahapan pelaksanaan meliputi:

1. Tahap Persiapan

- a. Koordinasi awal dengan Pemerintah Provinsi Papua (badan Pengelola Perbatasan dan Kerjasama) dan instansi terkait.
- b. Pengumpulan dan penyiapan data awal, dokumen kebijakan, serta peta dasar yang diperlukan.
- c. Penyiapan perangkat survei dan instrumen pengumpulan data.
- d. Mobilisasi tim pendamping.
- e. Penyusunan kerangka kerja dan rencana pelaksanaan kegiatan, meliputi metode kajian, jadwal kegiatan, kebutuhan data, serta bentuk luaran yang akan dihasilkan.

2. Tahap Pelaksanaan Kajian

- a. Survei dan Pengumpulan Data
  - Pengumpulan data lapangan secara sistematis untuk memperoleh gambaran kondisi eksisting calon lokasi pembangunan PLBL.
  - Identifikasi kondisi fisik wilayah, aksesibilitas, penggunaan lahan, lingkungan, serta ketersediaan prasarana dan infrastruktur pendukung.
  - Pengumpulan data sosial ekonomi dan aktivitas masyarakat yang berkaitan dengan kebutuhan pelayanan lintas batas laut.
  - Survei kelembagaan melalui wawancara dan diskusi dengan pemerintah daerah, OPD terkait, masyarakat, serta pemangku kepentingan lainnya.
- b. Tahap Analisis dan Perumusan Rekomendasi
  - Analisis kelayakan pembangunan PLBL berdasarkan aspek tata ruang, fisik dan lingkungan, aksesibilitas, sosial ekonomi, kebutuhan pelayanan, infrastruktur, serta kelembagaan.
  - Evaluasi kesesuaian rencana pembangunan dengan kebijakan, dokumen perencanaan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - Identifikasi potensi, kendala, dan isu strategis yang berpengaruh terhadap pembangunan dan pengoperasian PLBL.
  - Perumusan rekomendasi kelayakan pembangunan, lokasi, kebutuhan fasilitas dan infrastruktur pendukung, serta arahan pengembangan PLBL Kota Jayapura.

3. Tahap Diskusi (*Focus Group Discussion*)
  - a. Pelaksanaan *Focus Group Discussion* (FGD) sebagai forum partisipatif yang melibatkan Pemerintah Daerah, OPD terkait, masyarakat, tokoh masyarakat/adat, dan pemangku kepentingan lainnya.
  - b. Pemaparan hasil survei, analisis kelayakan, dan identifikasi permasalahan serta potensi pembangunan PLBL.
  - c. Pembahasan dan validasi hasil kajian bersama para pemangku kepentingan.
  - d. Perumusan masukan dan penyempurnaan rekomendasi kelayakan pembangunan PLBL Kota Jayapura berdasarkan hasil diskusi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Alternatif Lokasi

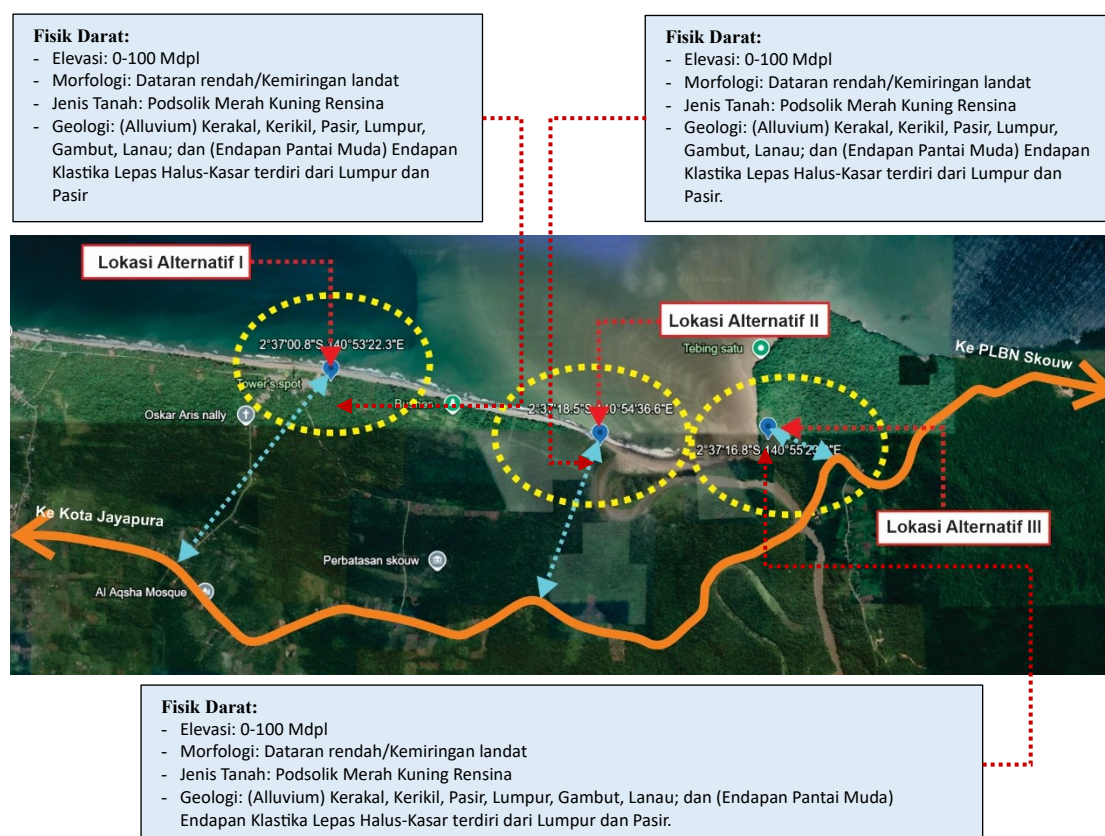
Penetapan tiga lokasi alternatif dilakukan untuk memastikan bahwa rencana pembangunan Pos Lintas Batas Laut (PLBL) dapat berjalan secara efektif, aman, dan berkelanjutan. Pemilihan lokasi tidak hanya mempertimbangkan faktor teknis fisik kawasan pesisir, tetapi juga aspek sosial budaya, lingkungan, aksesibilitas, serta potensi ekonomi kawasan. Setiap lokasi di analisis berdasarkan kesesuaian lahan, kondisi geografis, dukungan infrastruktur, keamanan wilayah perbatasan, serta penerimaan masyarakat lokal. Dengan membandingkan ketiga lokasi alternatif secara sistematis, pemerintah dapat memperoleh gambaran objektif mengenai lokasi yang paling layak dikembangkan, sekaligus meminimalkan risiko terhadap lingkungan dan sosial. Pendekatan ini menjadi landasan penting untuk menjamin bahwa pembangunan PLBL memberikan manfaat maksimal bagi peningkatan konektivitas antarnegara, pelayanan kepabeanan dan keimigrasian, serta penguatan fungsi pertahanan di wilayah perbatasan.



Gambar: 1. Lokasi Alternatif Pos Lintas Batas Laut (PLBL) Kota Jayapura

## Profil Lokasi

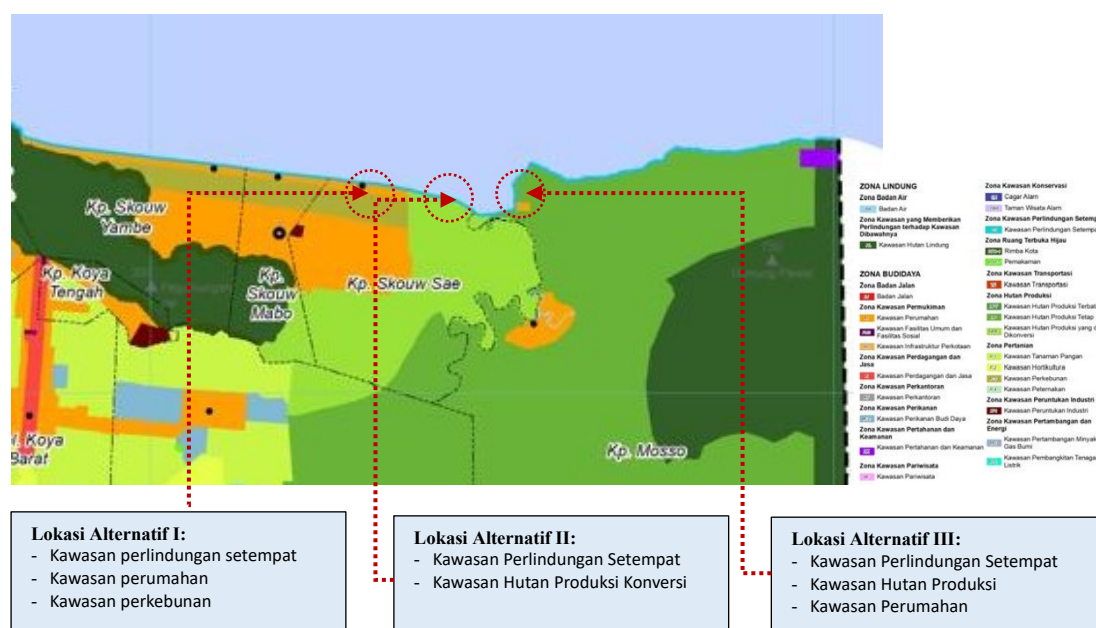
Aspek fisik lokasi di wilayah pesisir Distrik Muara Tami menjadi faktor kunci dalam menilai kelayakan rencana pembangunan PLBL, mengingat karakteristik pesisir memiliki dinamika lingkungan yang kompleks dan dipengaruhi oleh pasang surut, gelombang, arus, dan proses abrasi-sedimentasi. Kondisi topografi pantai perlu dicermati karena akan menentukan stabilitas struktur, kebutuhan penguatan lahan, dan perencanaan fasilitas dermaga. Selain itu, lokasi pesisir Muara Tami masuk dalam kawasan yang memiliki tingkat kerawanan bencana risiko tinggi, sehingga penataan kawasan, desain teknis bangunan, dan sistem proteksi pesisir harus direncanakan secara cermat. Dengan memahami seluruh aspek fisik tersebut, pembangunan PLBL dapat diarahkan untuk aman, fungsional, dan berkelanjutan dalam mendukung aktivitas lintas batas laut di wilayah perbatasan Indonesia-Papua Nugini. Berikut ini gambaran aspek fisik lokasi alternatif rencana pembangunan PLBL di Kota Jayapura berada di Distrik Muara Tami.



Gambar. 2. Keadaan Fisik Lokasi Alternatif Pos Lintas Batas Laut (PLBL) Kota Jayapura

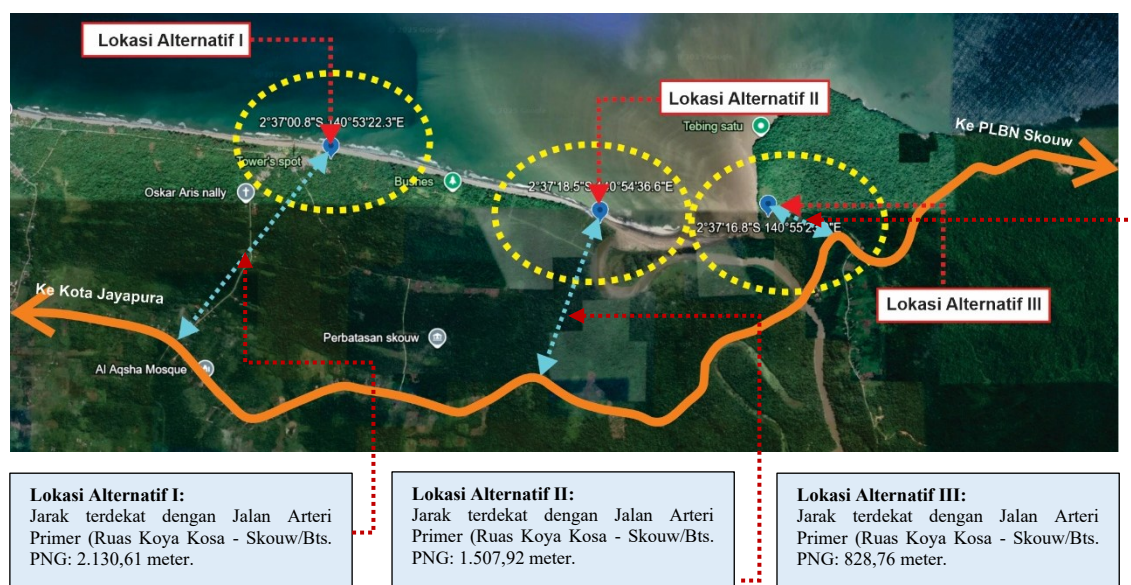
Aspek spasial lokasi di wilayah pesisir Distrik Muara Tami memiliki peran strategis dalam mendukung rencana pembangunan PLBL, karena kawasan ini berada pada koridor perbatasan Indonesia-Papua Nugini dan menjadi pintu masuk potensial bagi mobilitas barang, manusia, dan aktivitas pelayanan lintas batas. Secara spasial, lokasi pesisir Muara Tami

terhubung langsung dengan jalur laut perbatasan, memiliki kedekatan dengan pusat permukiman, kawasan pelayanan pemerintahan, serta jaringan transportasi darat menuju Kota Jayapura, sehingga memudahkan integrasi fungsi PLBL dengan sistem logistik dan pelayanan kawasan perbatasan. Namun demikian, pola ruang pesisir yang terdiri atas campuran permukiman, zona budidaya, kawasan lindung, serta area dengan kerentanan bencana tertentu perlu diperhatikan agar penempatan PLBL tetap selaras dengan struktur ruang, menghindari konflik pemanfaatan lahan, dan mendukung pengembangan wilayah perbatasan secara berkelanjutan.



Gambar. 3. Peta Rencana Pola Ruang Lokasi Alternatif Pos Lintas Batas Laut (PLBL) Kota Jayapura

Tingkat aksesibilitas lokasi pesisir di Distrik Muara Tami menjadi salah satu pertimbangan penting dalam rencana pembangunan PLBL, karena kelancaran pergerakan barang, orang, dan layanan lintas batas sangat bergantung pada kemudahan pencapaian menuju dan dari kawasan tersebut. Secara umum, wilayah pesisir Muara Tami memiliki akses darat yang cukup baik melalui jaringan jalan penghubung ke pusat Distrik Muara Tami dan Kota Jayapura, sehingga memungkinkan integrasi PLBL dengan pusat kegiatan ekonomi dan pelayanan kota. Di sisi lain, aksesibilitas laut dipengaruhi oleh kondisi perairan, kedalaman, serta keterhubungan dengan jalur pergerakan kapal di sepanjang perbatasan Indonesia-Papua Nugini. Kombinasi akses darat dan laut ini memberikan peluang besar bagi pengembangan PLBL, namun tetap memerlukan perencanaan teknis yang cermat agar aksesibilitas yang ada dapat ditingkatkan menjadi lebih aman, efisien, dan mendukung fungsi strategis kawasan perbatasan.



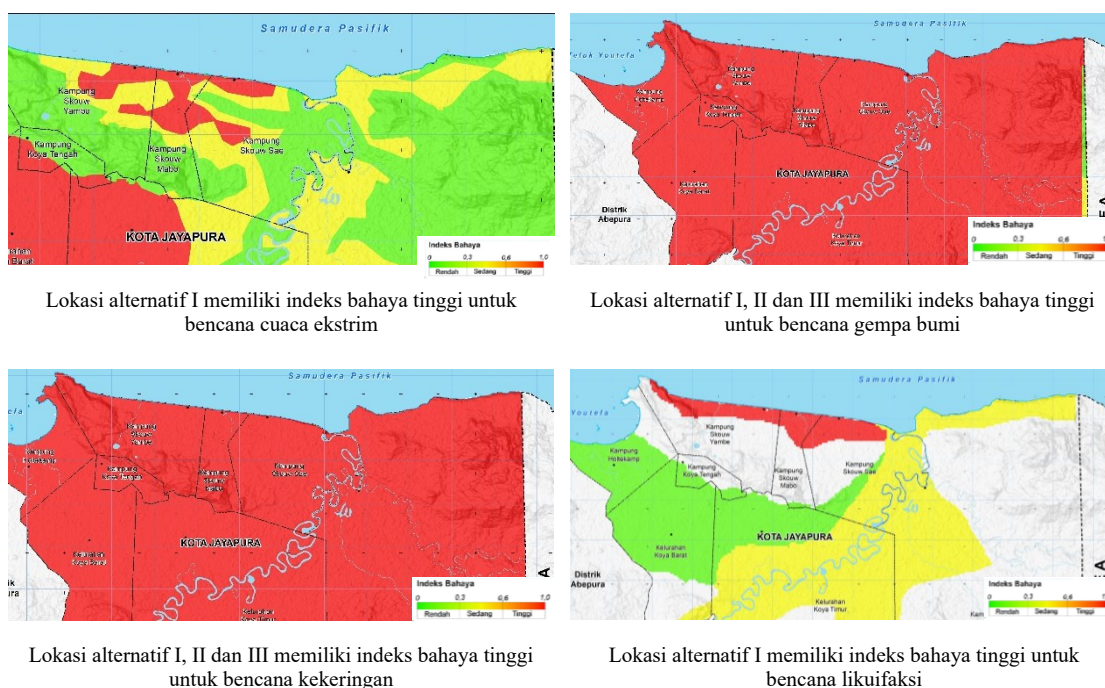
Gambar: 4. Lokasi Alternatif Pos Lintas Batas Laut (PLBL) Kota Jayapura

Aspek sosial budaya masyarakat di wilayah pesisir Distrik Muara Tami menjadi bagian penting dalam mendukung rencana pembangunan PLBL, karena keberhasilan pengembangan kawasan perbatasan sangat bergantung pada penerimaan, keterlibatan, dan adaptasi masyarakat setempat. Komunitas pesisir di Muara Tami memiliki pola kehidupan yang erat dengan aktivitas perikanan, hubungan kekerabatan yang kuat, serta interaksi sosial tradisional yang telah lama terbentuk, termasuk kedekatan budaya dengan masyarakat di wilayah perbatasan Papua Nugini. Keberadaan PLBL berpotensi membuka akses ekonomi baru dan memperkuat konektivitas antarwilayah, namun juga dapat membawa perubahan sosial, pola aktivitas harian, dan dinamika budaya lokal. Karena itu, pemahaman terhadap nilai-nilai lokal, struktur sosial, serta praktik adat yang hidup di masyarakat menjadi kunci agar pembangunan PLBL dapat berlangsung secara harmonis, inklusif, dan memberikan manfaat berkelanjutan bagi komunitas pesisir Muara Tami.

Masyarakat di Kampung Skouw Sae dan Kampung Mosso terdiri dari komunitas asli Papua yang memiliki ikatan kekerabatan kuat dan pola kehidupan yang masih berlandaskan nilai-nilai adat. Struktur sosial bersifat komunal, dengan mekanisme pengambilan keputusan yang melibatkan kepala suku, tokoh adat, dan tokoh agama. Aktivitas sosial banyak dipengaruhi oleh kedekatan masyarakat dengan wilayah perbatasan, sehingga hubungan sosial dengan warga Papua Nugini melalui mekanisme kunjungan keluarga, barter tradisional, atau interaksi budaya masih terjadi secara informal. Kehidupan beragama cukup kuat, dengan gereja menjadi pusat kegiatan sosial dan komunitas. Masyarakat memiliki budaya gotong royong yang tinggi, terutama dalam kegiatan pembangunan rumah, acara adat, dan penyelenggaraan

kegiatan kampung. Modernisasi mulai masuk seiring keberadaan PLBN Skouw, namun nilai adat dan struktur sosial tradisional tetap menjadi landasan kehidupan sehari-hari.

Aspek kebencanaan di wilayah pesisir Distrik Muara Tami merupakan faktor krusial yang harus diperhatikan dalam rencana pembangunan PLBL, mengingat kawasan pesisir memiliki tingkat kerentanan yang tinggi terhadap berbagai jenis bahaya alam. Lokasi ini berpotensi terdampak banjir rob, abrasi pantai, gelombang tinggi, serta bencana geologi seperti likuifaksi yang tergolong sedang pada sebagian wilayah pesisir Muara Tami. Dinamika laut yang dipengaruhi perubahan iklim, termasuk kenaikan muka air laut dan intensitas badai, juga dapat meningkatkan risiko terhadap fasilitas pelabuhan dan infrastruktur perbatasan. Oleh karena itu, pemahaman menyeluruh mengenai profil risiko kebencanaan diperlukan untuk memastikan bahwa desain, lokasi, dan sistem proteksi PLBL direncanakan secara aman, adaptif, dan tahan terhadap ancaman bencana, sehingga keberlanjutan operasionalnya di kawasan perbatasan dapat terjamin.



Gambar. 5. Peta Indeks Bahaya Kebencanaan di Wilayah Studi

Secara umum ketiga lokasi alternatif, dua lokasi di Kampung Skouw Sae (Alternatif I dan II), dan satu lokasi di Kampung Mosso (Alternatif III), memiliki karakter kebencanaan yang hampir sama, yaitu berpotensi terdampak likuifaksi, banjir, gelombang tinggi, cuaca ekstrem, serta beberapa jenis bencana pesisir lainnya. Namun, dari seluruh jenis ancaman tersebut, risiko likuifaksi merupakan yang paling menonjol, dengan tingkat kerentanan yang tergolong tinggi akibat kondisi tanah berpasir jenuh air dan morfologi pesisir yang rawan mengalami guncangan kuat. Sementara itu, ancaman lainnya seperti banjir, gelombang tinggi,

dan cuaca ekstrem umumnya berada pada kategori rendah hingga sedang, dipengaruhi oleh variabilitas musiman dan dinamika alam di kawasan pesisir. Meski tidak setinggi risiko likuifaksi, potensi bencana-bencana tersebut tetap perlu diperhitungkan dalam perencanaan dan pengembangan fasilitas di wilayah perbatasan.

Secara sosial-ekonomi, masyarakat Distrik Muara Tami terdiri atas penduduk asli Papua dan pendatang dari berbagai daerah di Indonesia. Aktivitas utama mereka meliputi perikanan tangkap, perdagangan lintas batas, pertanian, dan sebagian kecil jasa transportasi. Di bagian timur distrik ini terdapat Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Skouw, yang menjadi simpul penting perdagangan dan mobilitas antarnegara. Infrastruktur jalan utama yang menghubungkan Jayapura dengan Skouw sudah terbangun baik, meskipun beberapa jalur ke pesisir masih berupa jalan tanah atau belum sepenuhnya diaspal.

Aspek perekonomian lokal di wilayah pesisir Distrik Muara Tami menjadi pertimbangan penting dalam rencana pembangunan PLBL, karena aktivitas ekonomi masyarakat setempat umumnya berbasis pada pertanian, perkebunan, perikanan, perdagangan kecil, serta jasa pendukung yang bergantung pada akses terhadap sumber daya pesisir. Keberadaan PLBL berpotensi memperluas peluang ekonomi melalui peningkatan arus barang dan jasa lintas batas, penguatan konektivitas dengan Papua Nugini, serta tumbuhnya sektor-sektor baru seperti logistik, perdagangan antarnegara, dan pelayanan transportasi laut. Namun, dinamika ekonomi lokal yang masih terbatas skalanya memerlukan pendekatan pengembangan yang inklusif agar manfaat PLBL dapat dirasakan langsung oleh masyarakat pesisir, melalui penciptaan lapangan kerja, pembinaan usaha lokal, dan integrasi kegiatan ekonomi tradisional dengan sistem perdagangan modern. Dengan demikian, pemahaman terhadap kondisi ekonomi lokal menjadi landasan strategis untuk memastikan pembangunan PLBL mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di kawasan perbatasan Distrik Muara Tami.

Secara umum, kegiatan ekonomi masyarakat pada ketiga lokasi alternatif, dua lokasi di Kampung Skouw Sae (Alternatif I dan II), dan satu lokasi di Kampung Mosso (Alternatif III), memiliki karakter yang relatif sama, yaitu bertumpu pada aktivitas pertanian, perkebunan, dan perikanan. Masyarakat di ketiga lokasi masih mengandalkan pertanian lahan kering sebagai sumber pangan utama, seperti penanaman umbi-umbian, jagung, dan sayuran. Selain itu, perkebunan skala kecil berupa tanaman pisang, kelapa, dan komoditas tahunan lain turut menjadi bagian dari mata pencaharian sehari-hari. Di sisi pesisir, masyarakat juga melakukan perikanan tradisional, baik melalui penangkapan di perairan pantai, muara sungai, maupun perairan dangkal di sekitar kampung. Walaupun intensitasnya berbeda antara Skouw Sae dan

Mosso, pola ekonomi yang terbentuk pada dasarnya serupa, mencerminkan ketergantungan masyarakat terhadap sumber daya alam lokal dan aktivitas ekonomi berbasis subsisten.

### **Alternatif Lokasi Terpilih**

Penetapan lokasi pembangunan Pos Lintas Batas Laut (PLBL) dilakukan melalui proses diskusi dan evaluasi mendalam dalam forum rapat/*Focus Group Discussion* (FGD) yang melibatkan para pemangku kepentingan utama, antara lain Badan Pengelola Perbatasan, Bappeda, Dinas Pekerjaan Umum, Kepala Pos Angkatan Laut, Kepala Distrik, Kepala Kampung, serta instansi teknis terkait lainnya. Forum ini menjadi ruang bersama untuk menyelaraskan kebutuhan keamanan perbatasan, kepentingan pembangunan wilayah, serta aspirasi masyarakat lokal. Dalam FGD tersebut, pemilihan lokasi didasarkan pada sejumlah pertimbangan strategis yang meliputi aspek fisik, lingkungan, kesesuaian tata ruang, aspek teknis infrastruktur, aksesibilitas dan konektivitas, potensi pelayanan lintas batas, hingga faktor sosial ekonomi masyarakat setempat. Setiap lokasi alternatif dianalisis secara komprehensif untuk memastikan bahwa PLBL yang dibangun nantinya tidak hanya memenuhi standar keamanan dan operasional, tetapi juga memberikan manfaat maksimal bagi pengembangan kawasan perbatasan.

Melalui proses musyawarah yang terbuka dan berbasis data, para peserta FGD menyampaikan pandangan, pengalaman lapangan, serta analisis sektoral sehingga menghasilkan kesepakatan bersama terhadap satu lokasi yang dinilai paling layak. Kesepakatan ini menjadi dasar kuat penetapan lokasi PLBL, sekaligus wujud kolaborasi antar-lembaga dalam mendukung upaya pemerintah memperkuat konektivitas, pelayanan lintas batas, dan pembangunan wilayah perbatasan secara berkelanjutan.

Berdasarkan rangkaian diskusi, pemaparan data teknis, serta pertimbangan lintas sektor yang dilakukan dalam forum FGD bersama para pemangku kepentingan, termasuk Badan Pengelola Perbatasan, Bappeda, Dinas Pekerjaan Umum, Pos Angkatan Laut, pemerintah distrik dan kampung, serta instansi terkait lainnya. Forum akhirnya mencapai kesepakatan bersama bahwa Lokasi Alternatif I dipilih sebagai lokasi pembangunan PLBL. Kesepakatan ini lahir melalui proses pembahasan yang terbuka dan komprehensif terhadap ketiga alternatif lokasi. Para peserta FGD menilai bahwa Lokasi Alternatif I memiliki keunggulan yang lebih menonjol, baik dari aspek fisik, lingkungan, kesesuaian tata ruang, kedekatan dengan pusat aktivitas masyarakat, kelayakan teknis untuk pembangunan sarana dan prasarana pelabuhan, maupun dukungan dari aparat keamanan dan pemerintah setempat. Selain itu, lokasi ini dinilai memberikan efisiensi operasional, aksesibilitas yang lebih baik, serta potensi pengembangan kawasan yang lebih berkelanjutan dalam jangka panjang.



Gambar: 6. Kegiatan Rapat Bersama Stakeholder Terkait, Dalam Rangka Penetapan Lokasi Terpilih Rencana Pembangunan PLBL Distrik Muara Tami Kota Jayapura

Lokasi alternatif I dipilih sebagai lokasi yang paling layak melalui proses evaluasi menyeluruh yang mencakup aspek fisik wilayah, kesesuaian tata ruang, serta pertimbangan sosial-kelembagaan yang diperoleh dari forum diskusi pemangku kepentingan. Dari sisi fisik, lokasi ini menunjukkan kondisi lahan yang relatif stabil, topografi yang lebih datar, serta aksesibilitas yang lebih baik dibandingkan alternatif lainnya, sehingga mendukung efisiensi pembangunan dan operasional jangka panjang. Berdasarkan aspek tata ruang, lokasi alternatif I berada dalam zona yang sesuai dengan peruntukan rencana pengembangan, minim potensi konflik dengan fungsi ruang eksisting, serta memberikan peluang integrasi dengan infrastruktur dan jaringan pelayanan yang telah direncanakan. Selain itu, melalui FGD, para pemangku kepentingan, termasuk perwakilan pemerintah, tokoh masyarakat, serta instansi teknis terkait, mencapai kesepakatan bahwa lokasi ini paling memenuhi kriteria kelayakan, memiliki risiko sosial dan lingkungan yang dapat dikelola, serta menawarkan manfaat terbesar bagi pengembangan kawasan. Kombinasi dari ketiga pertimbangan tersebut menjadikan lokasi alternatif I sebagai pilihan yang disepakati untuk direkomendasikan dalam perencanaan lebih lanjut.

Dengan mempertimbangkan berbagai faktor tersebut, forum FGD secara mufakat menyatakan bahwa Lokasi Alternatif I merupakan lokasi yang paling memenuhi persyaratan untuk pembangunan PLBL. Keputusan ini menjadi dasar penetapan lokasi dalam dokumen perencanaan, sekaligus mencerminkan keselarasan pandangan antara pemerintah daerah, aparat keamanan, dan perwakilan masyarakat terhadap arah pengembangan wilayah perbatasan.

## **KESIMPULAN**

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui pendampingan penataan bangunan dan lingkungan pada Koridor Jalan Utama Perkotaan Oksibil telah dilaksanakan secara sistematis dan partisipatif. Pendampingan ini menghasilkan desain penataan bangunan dan lingkungan yang disusun berdasarkan kondisi eksisting kawasan, ketentuan perencanaan yang berlaku, serta karakteristik lokal wilayah Oksibil. Proses perencanaan dilakukan tidak hanya dengan pendekatan teknokratis, tetapi juga melalui integrasi aspek sosial dan budaya setempat.

Pelaksanaan pendampingan melibatkan partisipasi aktif seluruh pemangku kepentingan, termasuk masyarakat setempat, tokoh adat, kepala kampung, kepala distrik, serta organisasi perangkat daerah terkait. Keterlibatan multipihak ini berperan penting dalam memastikan bahwa konsep dan desain penataan bangunan dan lingkungan yang dihasilkan memiliki legitimasi sosial, mencerminkan kebutuhan nyata di lapangan, serta realistis untuk diimplementasikan oleh pemerintah daerah.

Sebagai luaran utama kegiatan pengabdian, telah tersusun dokumen penataan bangunan dan lingkungan Koridor Jalan Utama Perkotaan Oksibil yang memuat konsep, desain, serta arahan teknis penataan kawasan. Dokumen ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang dalam pengendalian pemanfaatan ruang dan peningkatan kualitas lingkungan perkotaan secara berkelanjutan, sekaligus memperkuat peran perguruan tinggi dalam mendukung pembangunan daerah melalui pendekatan pendampingan dan pemberdayaan masyarakat.

## **UCAPAN TERIMA KASIH**

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kegiatan “Kajian Kelayakan Pembangunan Pos Lintas Batas Laut (PLBL) Kota Jayapura” dapat terlaksana dengan baik dan laporan kegiatan ini dapat disusun sebagaimana mestinya. Tim pelaksana menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada:

1. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Muhammadiyah Berau atas dukungan, fasilitasi, dan kepercayaan yang diberikan dalam pelaksanaan kegiatan ini.
2. Pemerintah Kota Jayapura beserta seluruh perangkat daerah dan instansi terkait atas kerja sama, dukungan, serta keterbukaan dalam penyediaan data dan informasi yang diperlukan selama pelaksanaan kajian kelayakan pembangunan PLBL Kota Jayapura.

3. Masyarakat, tokoh masyarakat, tokoh adat, dan para pemangku kepentingan yang telah berpartisipasi aktif, memberikan informasi, serta menyampaikan masukan dan pandangan yang konstruktif selama proses pengumpulan data dan pelaksanaan kajian.
4. Rekan-rekan sejawat serta reviewer internal LPPM Universitas Muhammadiyah Berau atas saran, masukan, dan kontribusi yang konstruktif dalam meningkatkan kualitas pelaksanaan kegiatan dan penyusunan laporan kajian ini.

Akhir kata, tim pelaksana menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam pelaksanaan kegiatan Kajian Kelayakan Pembangunan Pos Lintas Batas Laut (PLBL) Kota Jayapura. Dukungan dan partisipasi seluruh pihak menjadi bagian penting dalam menghasilkan kajian yang komprehensif dan rekomendasi yang dapat memberikan manfaat bagi Pemerintah Kota Jayapura dalam menentukan arah pembangunan PLBL yang efektif dan fungsional.

## REFERENCES

- Arkam<sup>1\*</sup>, Dwi Fitriyaningsih<sup>2</sup>, Wahyu Atiq Widianoro<sup>3</sup>, Djufri<sup>4</sup>, Agista Aristia Arini<sup>5</sup>, Mupid Datusahlan<sup>6</sup> (2025). Pendampingan Pemerintah Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang Dalam Penataan Bangunan dan Lingkungan Permukiman Masyarakat di Perkotaan Oksibil. *Mandela : Jurnal Ilmiah Pengabdian Masyarakat*: 1(1): 1-9. <https://jurnal-umberau.com/index.php/mandela/article/view/1104>
- Fredi Mainassy<sup>1\*</sup>, Eva lisantri<sup>2</sup>, Sulviyani Suardi<sup>3</sup>. (2026). Transformasi Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Terpadu Laut sebagai Simpul Konektivitas Strategis dalam Kerangka BIMP-EAGA Vision 2035. *Aliansi, Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora*: 3(1): 123-141. <https://journal.appihi.or.id › article › download>.
- Maisondra, Fauzia Astarina Cempaka Timur. (2023). Pembangunan Kawasan Pos Lintas Batas Negara (Plbn) dan Dampaknya Terhadap Kebijakan Keamanan Nasional. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa (JIPSK)*: 8(2): 210-225. <https://ejournal.ipdn.ac.id › article › download>
- Regina Laurentia Jocelyn Suryawijaya<sup>a</sup>, Suryo Sakti Hadiwijoyo<sup>b</sup>, Triesanto Romulo Simanjuntak<sup>c</sup>. (2025). Pos Lintas Batas Negara Serasan Sebagai Strategi Pertahanan Indonesia Diperbatasan Natuna. *Jurnal Imu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jambi (JISIP-UNJA)*: 9(2): 01-215. <https://online-journal.unja.ac.id/jisip/article/view/44147/22906>
- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/39908>

Undang-undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara.

<https://peraturan.bpk.go.id/Download/29499/UU%20Nomor%2026%20Tahun%202007.pdf>

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/39012/uu-no-2-tahun-2012>

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

<https://peraturan.bpk.go.id/Details/38521/uu-no-1-tahun-2014>

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38209/uu-no-9>

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

[https://peraturan.bpk.go.id/Details/246523/uu-no-6-tahun-2023?utm\\_source](https://peraturan.bpk.go.id/Details/246523/uu-no-6-tahun-2023?utm_source)

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah.

<https://peraturan.bpk.go.id/Details/51840/pp-no-16-tahun-2004>

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan.

<https://peraturan.bpk.go.id/Details/49132/pp-no-34-tahun->

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

<https://peraturan.bpk.go.id/Details/4760/pp-no-38-tahun-2007>

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas PP No 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN).

<https://peraturan.bpk.go.id/Download/40739/PP%2013%20TAHUN%202017.pdf>

Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2015 Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Papua. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/41768/perpres-no-32-tahun-2015>

Perpres RI Nomor 119 Tahun 2022 tentang RDTR Kawasan Perbatasan Negara Pada Pusat Pelayanan Pintu Gerbang Skow di Provinsi Papua.

<https://peraturan.bpk.go.id/Details/304448/perpres-no-119-tahun-2022>

Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 9 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Papua Tahun 2023-2042. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/314554/perda-prov-papua-no-9-tahun-2023>